

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berita hoax adalah sebuah informasi atau berita palsu yang direkayasa oleh penulisnya. Hoax ini bertumbuh kembang seiring dengan popularitas media sosial sekarang ini, hoax umumnya digunakan untuk humor atau lelucon tapi banyak juga orang yang menyalah gunakannya seperti membuat berita palsu atau bahkan memberitakan seseorang dengan memfitnahnya. Dalam istilah jurnalistik berita hoax adalah berita bohong yang menjurus pada kasus pencemaran nama baik seseorang. Dengan demikian berita hoax bukan hal yang asing lagi dalam media sosial semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, bahkan penyebar berita yang dibuatnya sendiri, termasuk berita palsu atau hoax.

Saat ini penyebaran berita hoax atau berita palsu makin marak. Survey Mastel 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoax setiap hari lebih dari satu kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran berita hoax adalah media sosial. Fenomena hoax diindonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat, hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian

Menurut Dewan pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut:

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan
2. Sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pegantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Ciri khas lain hoax adalah adanya HURUF KAPITAL, huruf tebal (**bold**), banyak tanda seru , dan tanpa menyebutkan sumber informasi. Shoemaker dan Reese (1996) menegaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi media yakni: faktor internal yang antara lain karakteristik individu pekerja media dan rutinitas yang berlagsug dalam organisasi mda (media routine) dan faktor eksternal media

yakni variabel ekstra media dan ideologi yang mempengaruhi isi media. Variabel ditingkat ekstramedia mempersoalkan sumber informasi media, pwnsiklanan, khalayak sasaran, control perintah, ataupun pasar media. (Shoemaker dan Reese 1996)

Kata “sosial” dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Inilah yang menurut Fuchs (2004) ada beberapa pertanyaan dasar ketika melihat kata sosial, misalnya terkait dengan informasi dan kesadaran ada pertanyaan dasar, seperti apakah individu itu adalah manusia yang secara sadar melakukan interaksi. Bahkan, dalam teori sosiologi disebutkan bahwa media pada dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagian dari masyarakat dan aspek dari masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang digunakan. Kolaborasi dan kerja sama juga menjadi fokus perhatian ketika membahas definisi sosial dalam media sosial. Secara teori, ketika membahas kata sosial, ada kesepahaman bahwa individu-individu yang ada dalam komunitas itu tidak hanya berada dalam sebuah lingkungan. Anggota komunitas harus kolaborasi hingga bekerja sama karena inilah karakter dari sosial itu sendiri (Fuchs, 2014: 5).

Komunikasi politik juga pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh, budaya politik, suatu masyarakat. Pada saat yang sama, komunikasi politik juga dapat melahirkan, memelihara dan mewariskan budaya politik. Sehingga dengan memperhatikan struktur pesan serta pola -pola komunikasi politik yang diperankannya, maka dapat dianalisis budaya politik suatu masyarakat. (Rush dan Althoff 1997:255).

Pada prakteknya media tidak hanya mengirimkan informasi apa adanya, tetapi berpartisipasi secara aktif menyikapi realitas politik sebagai aktor bagi diri mereka sendiri (Page, 1996). Media melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Peran inilah yang diharapkan dijalankan oleh media guna memajukan demokrasi (Norris, 2003). Konsistensi media menjalankan peran tersebut menjadi tolak ukur majunya demokrasi dalam suatu negara. (Page dan Norris, 1996. 2003).

Sebaliknya Robinson (2001) lewat *teori policy media interaction* berpandangan bahwa media berorientasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pengaruh tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpastian kebijakan politik dan

munculnya pertentangan (DISSENCE) antar elit politik dalam menyikapi suatu masalah (Robinson, 2001:1999). Dalam situasi ini jurnalis mampu untuk membingkai (framing) berita secara kritis atas ketidakpedulian pemerintah (inaction) sebagai bentuk tekanan politik untuk segera bertindak (Robinson, 1999:308). Jadi dalam pandangan ini media bersifat aktif dan kritis serta memberi pengaruh atas politik. (Robinson 2001:1999:308).

Istilah usia diartikan dengan lamanya seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu normal memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama (Nuswantari, 1998).

Masa dewasa biasa disebut sebagai masa paruh baya. Masa dewasa tampak lebih awal diusia 30 tahun, akan tetapi pada beberapa titik di usia 40 tahun. Menurut Hurlock (1996), usia 52 tahun berada dalam rentang perkembaga masa madya, yaitu antara usia 40-60 tahun. Masa dewasa madya, individu melakukan penyesuaian diri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu menentukan masalah – masalah merka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosinya.

Dalam *California Longitudinal Study*, pada waktu individu berusia 34 – 50 tahun, mereka adalah kelompok usia yang paling sehat, paling tenang, dan paling bisa mengontrol diri, dan juga paling bertanggung jawab. (Levinson & Peskin, 1981 dalam Satrock, 2002).

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena, Pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi Pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan *Link and Match*. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan sumber daya manusia dengan system Pendidikan. (Fadhilah Rahmawati, dkk. 2004).

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang sistem Pendidikan nasional menegaskan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan – kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat ( Lincoln Arsyad, 1997).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka Panjang. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja lebih – lebih bagi negara berkembang terutama Indonesia dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. (Sadono Sukimo, 2003).

Perilaku pada umumnya adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling Nampak sampai yang tidak Nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. (Oktaviana, 2015).

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. ( Notoatmodjo, 2010).

Menurut Sunaryo (2014:42) perilaku sosial adalah perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain. Penerimaan perilaku sosial sangat bergantung pada norma – norma sosial yang di atur oleh berbagai sarana kontrol. Perilaku individu ditentukan oleh norma yang berlaku pada suatu tempat yang dijadikan sebagai pedoman atau kebiasaan bertingkah laku dalam masyarakat. Menurut Sunaryo perilaku merupakan suatu tindakan yang memiliki manfaat bagi orang lain. (Sunaryo, 2014:42).

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi 2, yakni dalam bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit), dan dalam

bentuk aktif (dengan tindakan konkrit), sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup (SoekidjoNotoatmodjo, 1993:1).

Dalam jangka waktu satu tahun terakhir, istilah berita hoax atau berita bohong menjadi hal yang begitu akrab ditelinga masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya berita hoax terutama yang menyangkut soal sentimen agama dan politik yang tersebar di berbagai media di Indonesia. Berdasarkan data dari survey yang di rilis oleh masyarakat telekomunikasi (MASTEL) pada februari 2017, 91 persen hoax yang diterima oleh masyarakat adalah berita yang menyangkut tentang sosial politik 88,60 persen adalah SARA dan 41,20 persen berita yang tersebar adalah berita yang bertemakan kesehatan . setiap harinya 44,30 persen dari 1,116 orang mendapatkan berita hoax, dan 17,20 persen mendapatkan berita hoax lebih dari satu kali dala satu hari.

Mudahnya akses ke internet dan media sosial serta cepatnya aliran informasi dala medium tersebut membuat berita hoax sangat mudh menyebar. Kementerian komunikasi dan informatika mengungkapkan di tahun 2016 saja, tercatat ada delapan ratus ribu situs yang terindikasi sebagai penyebar berita hoax dan ujaran kebencian. Jumlah ini tidak termasuk jumlah pemilik akun media sosial yang juga menyebarkan berita hoax.

Dalam hal lain generasi milenial disini juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan juga penyebab tersebranya berita hoax dimedia sosial. Mudahnya akses dalam internet dan juga para pengguna yang rata dari semua kalangan membuat tantnagn yang lebih sulit lagi dalam menekan peredaran berita hoax dimedia sosial. Itu diakibatkan karena umumnya generasi milenial saat ini sudah tidak memperhatikan lagi apa itu bahaya dan juga kerugian dengan adanya berita hoax tersebut.

Pada umumnya generasi milenial yang juga termasuk dalam golongan penerus bangsa seharusnya lebih bijak dan baik lagi dalam menggunakan media sosial, karena banyak pihak yang dirugikan dengan adanya berita hoax tersebut dimedia sosial, baik itu individu maupun kelompok. Ada baiknya jika para pengguna media sosial lebih diawasi lagi dalam penggunaan media sosial terlebih lagi para pengguna yang masih dibawah umur.

Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1977-1994. Fase penting yang terjadi saat generasi milenial tumbuh adalah perkembangan teknologi yang memasuki kehidupan sehari – hari. Shiifman & Kanuk (2007:245). Sedangkan ciri – ciri dari generasi ini adalah tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi milenial sering dinamai *echo-boomers* atau *millennium generation* nama *echo-boomers* hadir karena mereka termasuk dalam generasi ini adalah generasi yang lahir pada masa perang dunia II. Sedangkan dinamai *millennium generation* karena mereka merasakan perkembangan teknologi dan pergantian tahun millennium. (Shiifman & Kanuk. 2007:245).

Pada waktu belakangan ini maraknya penyebaran berita hoax atau dikenal dengan berita palsu (*fake news*), khususnya melalui jejaring media sosial online, makin mengkhawatirkan penyebaran berita palsu itu tidak Cuma membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar namun tindakan tersebut juga dipakai pihak – pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan sendi – sendi persatuan bangsa. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat pemerintah secara tegas menyatakan perng terhadap penyebaran berita palsu. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan penyebaran berita palsu ini sehingga banyak pengamat menyebutnya sebagai “penyakit kanker yang menggerogoti demokrasi”. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi penyebaran berita hoax Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan proses ancaman untuk memproses hokum yang menyebarkan berita hoax. Salah satu peran dan upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran berita hoax adalah dengan memblokir situs internet (website) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. (UNRIABLE ONLINE NEWS, 2017).

Pengertian mengenai aparatur pemerintahan disebutkan oleh Dharma Setyawan dalam buku yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa “ Aparat pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas – tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku (Setyawan, 2004:169).

Menurut Soerwono Handyaningrat mengatakan bahwa aparatur pemerintahan adalah aspek – aspek admisinistrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan

organisasi. Aspek – aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. Dari definisi tersebut dikatakan bahwa aparatur pemerintahan merupakan organisasi kepegawaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau negara dalam melayani masyarakat. Aspek – aspek administrasi merupakan kelembagaan atau organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa aparatur merupakan aspek – aspek administrasi yang diperlukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Sedangkan menurut Sarwono mengemukakan lebih jauh tentang aparatur pemerintahan bahwa yang dimaksud tentang aparatur pemerintahan ialah orang – orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan pemerintahan. (Handyaningrat, 1982:154).

Pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE diterbitkan pemerintah karena menyadari pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi ibarat pedan bermta dua. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan efektif perbuatan melawan hukum. UU ITE dalam pasal- pasalnya mengatur rambu-rambu terkait aturan dan larangan apa saja yang harus dipatuhi masyarakat ketika mereka berinteraksi di dunia maya atau media sosial. Termasuk juga apa yang boleh diposting ataupun dilarang ditampilkan di dunia maya karena dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban umum.

Didalam peran aparat pemerintah juga tidak luput juga peran dari tokoh masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat yang selaku pemuka agama dan yang lainnya juga berperan penting dalam menekan beredarya berita hoax. Banyak yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yaitu salah satu contohnya adalah memberikn edukasi secara langsung dan juga memberi pendekatan terhdap pemuda yang termasuk kedalam generasi mileial untuk tidak terprovokasi berita hoax yang ada di media sosial. Karena dengan upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ini dianggap sangat efektif dlam menekan beredarnya berita hoax yang ada dimedia sosial.

Didesa Sidodadi ini yang sangat menarik dari penelitian ini adalah, tentang keadaan penduduknya yang lebih banyak daripada jumlah penduduk yang lain dari desa terdekat lainnya. Keadaan penduduk yang cukup banyak dan tingkat Pendidikan yang berbeda – beda menjadikan berbagai perilaku dan pemikiran dari setiap orang berbeda sehingga dengan adanya berita hoax yang bermunculan dimedia sosial menjadikan masalah sendiri bagi masyarakatnya. Dan menyebabkan perubahan tersendiri bagi masyarakat terutama pada perilaku dari setiap masing – masing masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Faktor - faktor apa saja yang menyebabkan berita Hoax dapat tersebar luas melalui media sosial pada pilpres 2019 ?
- 1.2.2 Faktor apa yang yang mempengaruhi perubahan perilaku pemilih milenial akibat berita Hoax melalui media sosial pada pilpres 2019?
- 1.2.3 Bagaimana peran aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menekan berita Hoax melalui media sosial pada pilpres 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan berita Hoax dapat tersebar luas melalui media sosial pada pilpres 2019.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku pemilih milenial akibat berita hoax melalui media sosial pada pilpres 2019.
- 1.3.3 Untuk mengetahui peran aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menekan beredarnya berita hoax melalui media sosial pada pilpres 2019

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Manfaat secara teoritis
  - 1.4.1.1 Manfaat untuk peneliti adalah penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penyebab pengaruh munculnya berita hoax yang ada di media sosial yang dapat merubah



perilaku pemilih milenial dan kemudian dapat diketahui oleh semua kalangan masyarakat.

1.4.1.2 untuk pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama atau sejenis, dan pembaca dapat menyempurkan kembali teori dalam karangan yang baru.

1.4.1.3 Penelitian ini sebagai referensi dalam Pendidikan. Penelitian yang berisi tentang pengaruh dan penggunaan media secara bijak dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang berkaitan dengan isi penelitian dan teori yang ada.

1.4.2 Manfaat secara praktis

1.4.2.1 penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan tentang apa saja yang mempengaruhi munculnya berita hoax di media sosial dan juga apa saja yang bisa merubah perilaku generasi milenial yang dapat berdampak pada negara demokrasi Indonesia.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai sub focus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dalam penelitian ini sebagai ranah pemikiran yang mendasari peneliti tersusunlah kerangka pemikiran baik secara teoritis maupun konseptual. Adapun kerangka pemikiran secara teoritis dan konseptual.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang dapat merubah pola perilaku pemilih milenial pada pilpres 2019 di wilayah desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Diantaranya adalah para pengguna media sosial, karena saat ini para generasi milenial tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi dan juga suatu kebutuhan tersendiri dalam memperoleh informasi. Di samping itu penelitian ini juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terus bermunculannya berita hoax terkait dengan pilpres 2019.

Disini pemikiran peneliti menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku pemilih milenial adalah faktor usia, Pendidikan, dan pendapatan ekonomi. faktor tersebut adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan

perilaku pemilih milenial, bisa dikatakan seperti itu karena para pengguna media sosial yang termasuk ke dalam faktor tersebut sangat mudah sekali terpengaruhi dengan adanya berita hoax di media sosial. Karena mereka sangat kurang wawasan dan pengetahuan tentang apa itu berita hoax dan cara membedakan berita hoax jadi mereka tanpa berfikir Panjang akan langsung menyebarkan berita tersebut.

Dan juga ketika para pengguna media sosial yang juga termasuk ke dalam faktor yang sudah tercantum, di atas adalah para penerima yang cenderung tidak melihat dan meneliti dengan seksama apakah yang ada didalam berita itu benar atau bohong tapi mereka para penerima berita tersebut yang juga pengguna media sosial langsung mencerna isi berita tersebut dari hal yang negatif.

Dan dari faktor – faktor yang lainnya adalah frekuensi berita hoax dan juga konten berita hoax. Hal ini berpengaruh sekali karena rata – rata orang hanya membaca isi dari berita tersebut tanpa melihat sumber berita, apalagi diakibatkan seringnya seseorang menerima berita hoax tersebut menjadi lebih mudah lagi dipengaruhi.

Dalam sehari lebih dari sekali para pengguna media sosial menerima berita hoax di akun atau link yang mereka miliki dan dari situlah mereka mengetahui berita yang begitu banyaknya dan sangat beragam, membuat mereka semakin tidak mengerti mana yang harus dicerna dengan baik dan juga mana yang harus sebaiknya tidak dicerna atau dibuang saja karena bersifat kurang baik.

Disini peran aparat pemerintah dan juga tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk menekan berita hoax di media sosial. Karena aparat dan juga tokoh masyarakat memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab untuk memberikan rasa percaya dan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya.

Yang dimaksud disini peran aparat pemerintah adalah pegawai desa karena pada kehidupan masyarakat di desa yang bertanggung jawab pertama adalah para aparat desa. Karena merekalah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap masyarakatnya yang seharusnya mereka ayomi. Dan juga tokoh masyarakat disini yang dimaksud adalah para ulama dan juga pengurus organisasi karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari – hari dan juga biasanya mereka dipercaya oleh kalangan masyarakat dalam melakukan suatu keputusan.

## 1.6 Hipotesis

- 1.6.1 Faktor usia, faktor Pendidikan, faktor pendapatan ekonomi berpengaruh terhadap tersebar luasnya berita hoax melalui media sosial pada pilpres 2019.
- 1.6.2 Frekuensi berita hoax, dan konten berita hoax berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemilih milenial akibat berita hoax melalui media sosial pada pilpres 2019.
- 1.6.3 Peran aparat pemerintah dan tokoh masyarakat efektif dalam menekan berita hoax melalui media sosial pada pilpres 2019.

